

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan segala sesuatu yang didalamnya terdiri dari daerah wisata, wisatawan, objek wisata, perjalanan, industri, dan lain sebagainya yang merupakan kegiatan pariwisata. Pariwisata menjadi sasaran utama sumber devisa karena Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki beranekaragam jenis pariwisata contohnya wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, maupun wisata sosial yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Selain menyimpan berjuta pesona wisata alam yang begitu indah, Indonesia juga kaya akan wisata sejarah dan budaya terbukti dengan begitu banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah serta keanekaragaman seni adat dan budaya masyarakat lokal yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sehingga dengan banyaknya potensi yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai salah satu daerah tujuan wisata (Devy, 2017).

Zaenuri (2016) mengemukakan dalam Studi Bencana Wisata Merapi Kabupaten Sleman bahwa awal mula pariwisata adalah untuk memperoleh kehidupan yang nyaman dan menikmati keindahan lingkungan, sehingga industri pariwisata sangat rentan terhadap bencana dan gejolak lingkungan yang diakibatkan oleh bencana alam. persepsi risiko masyarakat tentang perubahan iklim. Jika tidak ada krisis, bencana,

gangguan cuaca ekstrim dan kerusakan besar-besaran di destinasi yang dikunjungi, semua orang akan bepergian. Selain itu, menurut Wickramasinghe (2008), bencana juga merupakan kejadian yang tidak terduga atau tidak dapat diprediksi, dan muncul dalam bentuk intensitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebangkitan industri pariwisata dilandasi oleh kompleksitas dan standar tertentu yang tidak sejalan dengan bencana.

Penelitian yang akan saya teliti ini merupakan akibat dari bencana non alam yaitu terdampaknya dari pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan kondisi yang disebabkan oleh virus. Virus yang menyebabkan pandemi merupakan organisme yang sebagian besar orang tidak memiliki kekebalan tubuh terhadap virus tersebut, dapat menular dengan mudah dari satu orang ke orang lain sehingga menyebabkan kematian. Virus ini sering disebut dengan Virus Corona (Kilbourne, 1987).

Dampak dari adanya Covid-19 ini menyebabkan kunjungan wisata yang menurun drastis. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman secara kumulatif (Januari–Juli 2020), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 3,25 juta kunjungan atau turun 64,64 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah 9,18 juta kunjungan (Badan Pusat Statistik).

Salah satu ciri fenomena bencana adalah ketidakpastian dan tidak terencana. Sebagaimana dinyatakan Duit & Galaz (2008: 313-315), perkembangan teori tata kelola menjadi salah satu paradigma terbaru dalam

manajemen publik membutuhkan pendekatan baru dalam penelitian. Menurut Duit & Galaz, fenomena tersebut dapat diwujudkan dalam perilaku sebagai berikut: 1) Threshold, kondisi terendah yang tidak dapat lagi ditolerir, 2) Raid, tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi, dan 3) Cascade (aliran efek), dengan kontinyu efek, efek Domino, efek aliran tipuan; ketiga perilaku ini adalah karakteristik yang melekat pada bencana.

Beberapa studi yang cukup penting tentang *disaster-tourism* sudah dilakukan oleh beberapa pakar tetapi masih belum menggunakan perspektif *governance*. Studi yang dilakukan oleh Wickramasinghe (2008) tentang upaya untuk merumuskan strategi yang tepat agar kunjungan wisatawan tidak terpengaruh dengan datangnya bencana cukup memberi gambaran yang komprehensif pada penyusunan strategi.

Mengingat kompleksitas bencana pariwisata dan keterbatasan pemerintah dalam penanggulangan bencana, maka pengelolaan pariwisata tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi harus melibatkan pihak swasta dan masyarakat agar memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang industri pariwisata. Fenomena pariwisata harus melibatkan tiga pilar pemerintahan (Pitana, 2005); Bramwell, 2007; Zhang, 2011). Selama ini, dalam menghadapi perubahan model tata kelola yang cepat berubah, penelitian yang mendalam masih kurang, bencana merupakan perubahan yang sangat cepat yang berdampak besar pada industri pariwisata. Respon tercepat terhadap perubahan yang disebabkan oleh bencana dan tetap

menyediakan layanan pariwisata adalah dengan menerapkan model tata kelola kolaboratif (Robertson, 2009).

Ansell dan Gash: 2007 mengatakan bahwa *Collaborative Governance* dapat diartikan sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kolaborasi merupakan kerjasama antar institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengelola objek wisata dan dalam rangka pencapaian tujuan. Kolaborasi juga tindakan yang sangat penting demi kemajuan sebuah daerah dan masyarakatnya (Febrian, 2016).

Menurut Nuryanti (2002: 12), kebutuhan untuk menjalin kemitraan terkait dengan permasalahan dalam pembangunan berkelanjutan industri pariwisata yang diakibatkan oleh konflik antara sektor publik dan swasta. Untuk menemukan keserasian antara keduanya, perlu dicari titik temu antara peran publik dan swasta dengan mengevaluasi kemungkinan partisipasi dan sinergi masing-masing sektor. Wanna (2008) menekankan bahwa dalam tata kelola kolaboratif diperlukan suatu intensitas untuk menunjukkan derajat kedekatan hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang berkolaborasi. Dalam model yang dikembangkan oleh Wanna tidak

memandang kolaborasi sebagai sebuah proses, kolaborasi terjadi karena terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang terus berkembang dalam hal kehidupan masyarakat dan penataan ruang. Yogyakarta pernah menjadi kota pusat pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlangsung hingga 17 Agustus 1945. Saat ini Yogyakarta adalah ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal luas sebagai ibu kota pendidikan tinggi dan salah satu kota Yogyakarta. Pusat Kebudayaan Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta (Adrisijanti, 2007). Saya sebagai peneliti tertarik mengangkat salah satu sektor yang ada di Kota Yogyakarta yaitu sektor pariwisata, karena di Kota Yogyakarta memiliki potensi pariwisata baik potensi alam, potensi masyarakat, maupun potensi budaya.

Sejak adanya pandemi Covid-19 dan mulai diberlakukannya kebijakan *social distancing* atau pembatasan sosial atau menjaga jarak sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Segala aktivitas menjadi lumpuh termasuk aktivitas pariwisata. Salah satu sektor yang terkena imbas dari Covid-19 ini adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata yang digambarkan menjadi pemberi kontribusi besar terhadap devisa negara di tahun 2020 menjadi runtuh dikarenakan dampak dari Covid-19 (Sulaiman, 2020). Terbukti dari jumlah kunjungan wisata yang

menurun. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pintu masuk Adisutjipto pada Februari 2020 turun 15,18 persen dibanding jumlah kunjungan pada Januari 2020, yaitu dari 8.371 kunjungan menjadi 7.100 kunjungan. Sedangkan jika dibandingkan dengan Februari 2019, jumlah kunjungan wisman Februari 2020 mengalami penurunan sebesar 26,07 persen (Badan Pusat Statistik).

Salah satu tempat wisata yang ada di Kota Yogyakarta yang terkena dampak Covid-19 dan berhubungan dengan Keraton Yogyakarta selain Tamansari dan salah satu pesanggrahan yang terletak diluar area Kraton Yogyakarta adalah Situs Warungboto. Situs Warungboto merupakan salah satu pesanggrahan yang didirikan Sultan Hamengku Buwono II masih menjadi putra mahkota pada tahun 1785. Situs ini terletak di sebelah timur pusat Kota Yogyakarta, lebih tepatnya di sisi selatan dan Kebun Binatang Gembira Loka dan mempunyai tempat peristirahatan raja sekaligus menjadi salah satu benteng pertahanan di bagian luar Kraton. Namun, dengan usia bangunan yang sudah sangat lama membuat bentuk dari beberapa bagian bangunan sudah berubah. Pengelolaan Situs Warungboto sebagai kawasan cagar budaya berada dibawah naungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Situs ini juga dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dikarenakan gempa tektonik yang melanda Jogja pada tahun 2006, kondisi Situs Warungboto rusak parah dan

kemudian direnovasi tanpa mengubah keasliannya. Setelah itu, Situs Warungboto dibuka untuk umum sejak pertengahan tahun 2016 dan menjadi salah satu destinasi wisata budaya di Yogyakarta.

Pada masa sekarang sebagai dampak dari Covid-19 yang mengakibatkan penurunan pengunjung cukup drastis, hal ini berbanding lurus dengan berkurangnya pendapatan dari objek wisata itu sendiri sehingga menyebabkan kurangnya biaya operasional untuk merawat objek wisata tersebut. Sedangkan untuk pengadaan alat-alat yang dipergunakan untuk memenuhi protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, alat pengukur suhu, batas jaga jarak tidak akan dapat dibeli apabila tidak adanya pendapatan yang masuk karena hanya sedikit wisatawan yang datang. (Irawan, 2020). Oleh sebab itu, pengelolaan Situs Warungboto hanya terbatas dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya saja, padahal pengelolaan Tamansari juga berada dalam naungan yang sama akan tetapi Tamansari turut dikelola oleh Keraton Yogyakarta. Dilihat dari sisi pengelolaan, sebaiknya Situs Warungboto juga melakukan kerjasama yang terintegrasi dengan pihak lain, agar pengelolaan mengenai situs ini lebih optimal.

Dari semua varian tersebut secara umum menjelaskan bagaimana peran dan hubungan diantara ketiga pilar pendukung *governance* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola isu-isu yang berkembang. Dari berbagai varian yang ada menunjukkan bahwa kolaborasi merupakan suatu fenomena yang didalamnya memunculkan berbagai

bentuk model yang kesemuanya bermuara pada bagaimana menciptakan kerjasama permanen dan mempunyai intensitas yang tinggi serta dibangun melalui proses yang runtut. Hal inilah yang mendorong untuk mengadakan penelitian di Objek Wisata Situs Warungboto dengan perspektif *collaborative governance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan yang terdapat di latar belakang adapun rumusan masalah yang akan diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata selama pandemi Covid-19 di Situs Warungboto?
2. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan objek wisata Situs Warungboto selama pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata selama masa pandemi Covid-19 di Situs Warungboto tahun 2020.
- Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan objek wisata Situs Warungboto.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Teoritis

- Dapat menjadi informasi bagi akademisi yang tertarik pada pengembangan wisata, khususnya dalam upaya melakukan kolaborasi dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bacaan.

b) Manfaat Praktis

- Menyediakan informasi yang akurat sebagai basis regulasi pariwisata-bencana baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Memberikan informasi yang komprehensif tentang pariwisata-bencana untuk dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan program pemerintah baik pusat maupun daerah.

1.5 Literatur Review

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu rujukan penelitian penulis, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Pada penelitian sebelumnya penulis tidak menemukan penelitian dengan nama yang sama dengan penelitian penulis. Namun demikian penulis mengajukan beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan penelitian dalam penelitian penulis. Berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya dalam beberapa format jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 1.1

Literatur Review

No.	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kelemahan
1.	Dimas Luqito (2016)	Proses kolaborasi antar stakeholders	Penelitian ini membahas tentang	Penelitian ini belum menjelaskan standar

	<p>“<i>Collaborative Governance</i> (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)”</p>	<p>dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo sudah memenuhi komponen kolaborasi Kirk Emerson. Proses kolaborasi dimulai dari penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan pembentukan kapasitas bersama.</p>	<p>proses kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan kawasan di Minapolitan. Sedangkan penelitian yang diteliti perspektif kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata.</p>	<p>atau indikator keberhasilan program dan indikator kinerja utama pada masing-masing instansi yang terlibat. Karna hal tersebut dapat memudahkan melakukan evaluasi pada masing-masing instansi sehingga hasil kinerja seluruh instansi dapat diukur keberhasilannya.</p>
2.	<p>Ranggi Ade Febrian (2016) “<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi)”</p>	<p>Collaborative governance sebagai basis pembangunan kawasan pedesaan dinilai akan mampu memaksimalkan potensi keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan kawasan pedesaan. Potensi untuk memajukan desa dengan mengkolaborasi pada rencana pembangunan dari tingkat Perpu, Perprov, Perda, dan Perdes melalui sebuah konsesus, dengan melibatkan berbagai stakeholder dan potensi masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang kolaborasi pemerintah dalam pembangunan kawasan pedesaan. Sedangkan penelitian yang diteliti membahas tentang kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata.</p>	<p>Penelitian ini hanya menilai kebijakan program-program pembangunan desa tanpa menjelaskan kebijakan program-program apa sajakah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa.</p>
3.	<p>Luthfi Andrianto Leman (2018) “Kolaborasi antar Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Religi</p>	<p>Target rencana kerja yang dapat mendekatkan pada tujuan yang ingin dicapai sehingga kolaborasi akan</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang keberhasilan aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan</p>	<p>Penelitian ini memiliki potensi yang baik dalam meningkatkan pendapatan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,</p>

	Sunan Giri di Kabupaten Gresik”	berjalan dengan baik. Keberhasilan aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata religi dalam dimensi hasil sementara ini terlihat ketika adanya rencana kerja antar setiap masing-masing aktor seperti upaya pengenalan dinasti wisata religi di Gresik khususnya makan Sunan Giri.	pariwisata religi. Sedangkan penelitian yang diteliti membahas aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Situs Warungboto.	namun masih terdapat berbagai permasalahan terkait bentuk kolaborasi atau Kerjasama antar stakeholder yang menghambat tercapainya tujuan.
4.	Nopriyono dan Suswanta (2019) “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif <i>Collaborative Governance</i> (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo)”	Collaborative Governance yang terjadi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Kelompok Budidaya Ikan, dan Pemdes dapat dikatakan cukup baik dan memperoleh hasil yang baik pula. Tetapi dilihat dari perspektif collaborative governance pelaksanaan kolaborasi ini belum sempurna karena belum adanya keterlibatan secara dominan 3 aktor yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta.	Penelitian ini membahas tentang kolaborasi antara Dinas Kelautan Perikanan dan masyarakat dalam pemberdayaan budidaya ikan. Sedangkan penelitian yang diteliti membahas tentang kolaborasi antara Dinas Kebudayaan Pariwisata dan masyarakat dalam mengelola objek wisata.	Penelitian ini kurang meningkatkan proses kolaborasi dengan melibatkan aktor-aktor penting lain seperti kurangnya peran dan keterlibatan aktor swasta sehingga menghambat pemasaran atau lebih ke inovasi pemasaran dan jika dilihat dari segi ekonomis akan lebih menguntungkan dan menghasilkan.
5.	Denny Irawan (2017) “ <i>Collaborative Governance</i> (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan	Proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya dilakukan melalui 3	Penelitian ini membahas tentang tahapan-tahapan dalam pengendalian pencemaran udara. Sedangkan	Penelitian ini belum menjelaskan indikator-indikator yang menunjukkan bahwa proses pemerintahan

	Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)”	tahap. Dari 3 tahap tersebut hanya satu kriteria yang telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemerintahan kolaboratif belum sepenuhnya berjalan secara efektif.	penelitian yang diteliti membahas tentang tahapan-tahapan dalam mengelola objek wisata.	kolaboratif belum berjalan secara efektif.
6.	Sri Yuliani (2017) “Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh KOTAKU di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta”	Kolaborasi dalam perencanaan proyek KOTAKU di Desa Semanggi sebaiknya dilakukan dengan konsep kolaborasi dalam SE DJCK General Guidelines No. 4/2016. Namun proses partisipasi, komunikasi dan sharing tersebut tidak sesuai dengan prinsip kerjasama yang diatur dalam SK DJCK No.4 Tahun 2016. Pada saat yang sama, prinsip penerimaan dan kepercayaan telah bekerja sama.	Penelitian ini membahas tentang kolaborasi perencanaan program. Sedangkan penelitian yang diteliti membahas tentang kolaborasi pengelolaan objek wisata.	Penelitian ini masih terdapat hambatan yang pertama kendala SDM berupa belum adanya ketetapan SK Pokja PKP tentang pemegang tugas pokok secara jelas. Kedua kendala komunikasi berypa sulitnya menentukan waktu yang tepat dalam pengadaan koordinasi karena terlalu banyak stakeholder yang terlibat.
7.	Novita Tresiana (2017) ”Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan”	Kolaboratif dalam perencanaan pengelolaan pariwisata perlu dikembangkan model pengelolaan pariwisata berbasis komunitas masyarakat. Beberapa sub-sub sistem yang mendukung terbentuknya masyarakat kolaboratif berbasis komunitas adalah penguatan modal sosial, penguatan	Penelitian ini membahas mengenai sub-sub sistem yang mendukung terbentuknya masyarakat kolaboratif. Sedangkan penelitian yang diteliti mengenai perspektif kolaborasi dalam mengelola objek wisata.	Penelitian ini hanya membahas sub-sub system yang mendukung terbentuknya masyarakat kolaboratif tanpa menjelaskan seperti apa sub-sub system tersebut.

		basis pengambilan keputusan, penguatan kelembagaan masyarakat lokal, dan tentunya potensi wisata Kiluan.		
8.	Yudi Kristian (2017) “Pengelolaan Objek Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat Danau Aco”	Pengelolaan objek wisata oleh Dinas Pariwisata pada objek wisata Danau di Kampung Linggang Malapeh dapat dikatakan memuaskan para wisatawan. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator pengelolaan objek wisata, yaitu aktrasi wisata, aksesibilitas, dan fasilitas. Dan ada beberapa faktor penghambat pengelolaan objek wisata Danau Aco yang pertama masyarakat yang belum memiliki payung hukum. Kedua kurangnya promosi dari pemerintah tentang objek wisata ini. Ketiga kurangnya dana.	Penelitian ini membahas tentang hasil pengelolaan objek wisata Danau Aco oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan penelitian yang diteliti membahas tentang hasil pengelolaan objek wisata Situs Warungboto oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.	Penelitian ini masih kurang dalam hal meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata yang lebih intensif dengan memanfaatkan teknologi, informasi, komunikasi, dan kerjasama dengan masyarakat dan pihak swasta dalam penyediaan paket wisata.
9.	Muchamad Zaenuri (2016) “Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance Studi Pariwisata-Bencana Volcano Tour Merapi Di Kabupaten Sleman”	Pengelolaan pariwisata-bencana dalam perspektif <i>collaborative governance</i> dengan memberikan otoritas penuh pada Tim Pengelola untuk menjadi penggerak transformasi merupakan alternatif	Penelitian ini membahas mengenai perspektif <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan pariwisata bencana alam. Sedangkan penelitian yang saya teliti mengenai perspektif	Penelitian ini kurang membuka jaringan kepada seluruh stakeholder pariwisata-bencana sehingga belum mampu meningkatkan kapasitasnya sebagai Lembaga yang otoritatif. Dengan Lembaga yang kuat tim

		<p>utama agar pengelolaan pariwisata-bencana dapat berlanjut. Dalam penelitian ini menghasilkan tesis yang agak berbeda dengan berbagai terori tentang collaborative governance. Dari hasil penelitian ini bahwa collaborative governance dalam kontek pariwisata-bencana mengalami transformasi dari hubungan yang bersifat informal menjadi formal, dari komando menuju kolaborasi, dan dari shared vision menuju kemitraan.</p>	<p>collaborative governance pengelolaan objek wisata bencana non alam.</p>	<p>pengelola bisa menjadi agen transformasi untuk mencapai kolaborasi yang sempurna.</p>
10.	<p>Nova Lidiana (2019) “Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tampora Desa Kalianget”</p>	<p>Kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora dilakukan melalui empat tahap kolaborasi, yaitu <i>assessment, inititation, deliberation</i>, dan <i>implementation</i>. Dalam kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora ketiga tahap kecuali <i>implementation</i> telah terlaksana sesuai dengan tahapan <i>collaborative governance</i> dan menghasilkan perjanjian kerjasama</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang pengembangan destinasi wisata. Sedangkan penelitian yang saya teliti membahas mengenai pengelolaan objek wisata.</p>	<p>Penelitian ini kurang meningkatkan komitmen sehingga belum dapat menjalankan tugas dan perannya masing-masing yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora.</p>

		antara Perhutani dan Dinas Pariwisata yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi. Setelah ketiga tahap tersebut, tahap selanjutnya adalah implementasi atau pelaksana. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam <i>collaborative governance</i> , tahap inilah yang menentukan apakah kolaborasi tersebut dapat terus dilangsungkan atau sebaliknya.		
11.	Dimas Kurniawan Pumada, Wilopo, Luchman Hakim (2016) “PENGELOLAAN DESA WISATA DALAM PERSPEKTIF COMMUNITY BASED TOURISM (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah”	Penerapan <i>community based tourism</i> dalam pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah dapat dilihat melalui beberapa hal seperti memastikan keikutsertaan anggota dalam setiap kegiatan pariwisata, pelestarian alam dan budaya, dan menjamin adanya pemerataan pendapatan masyarakat. Serta tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkatan <i>citizen control</i> .	Penelitian ini membahas mengenai perspektif <i>community based tourism</i> dalam pengelolaan desa wisata. Sedangkan penelitian yang saya teliti membahas mengenai perspektif <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan objek wisata.	Penelitian ini kurang meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pariwisata. Dan kepada Disbudpar diharapkan mampu membantu akses permodalan dan akses pengembangan kapasitas masyarakat wisata di Desa Wista Gubugklakah.
12.	Giat Tri Sambodo, Ulung Pribadi (2016) “Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa	Pelaksanaan <i>collaborative governance</i> di Desa Brosot dipengaruhi oleh <i>Starting Condition</i> ,	Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan <i>collaborative governance</i> di Desa Brosot yang	Penelitian ini masih terdapat beberapa factor menghambat yang pertama budaya untuk mengadakan arisan atau rapat sebaiknya dimulai

	Budaya Brosot, Galur, Kulon Progo”	<i>Institutional Design</i> , dan <i>Facilitative Leadership</i> . Hal ini sebagaimana ditulis oleh Ansell dan Gash (2007) , namun pada pelaksanaan <i>collaborative governance</i> faktor-faktor tersebut juga dipengaruhi oleh faktor budaya, antara lain hubungan kekerabatan, arisan, jam karet, musyawarah mufakat, dan gotong royong.	dipengaruhi oleh faktor budaya. Sedangkan penelitian yang saya teliti tentang kolaborasi <i>governance</i> dalam pengelolaan objek wisata yang disebabkan oleh bencana non alam.	pada waktu yang jelas dan tepat waktu. Kedua pendapat harus dinyatakan sebenarnya untuk dihindari rasa sungkan dan takut menyinggung orang lain. Ketiga budaya OSIS mulai dikurangi, agar dapat memberi kesempatan kepada orang lain dan anak muda untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Desa Budaya Brosot.
13.	Muchamad Zaenuri (2018) “Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari <i>Adaptive Governance</i> Menuju <i>Collaborative Governance</i> ”	Pengelolaan pariwisata pascabencana memerlukan perlakuan khusus, dalam konteks tata kelola perlu ditransformasikan dari tipe adaptif menjadi tipe kooperatif. Penanggulangan bencana alam dapat ditangani dengan menerapkan paradigma tata kelola adaptif, sedangkan pengelolaan pariwisata pascabencana harus menggunakan paradigma tata kelola kolaboratif.	Penelitian ini membahas mengenai perspektif <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan pariwisata bencana alam. Sedangkan penelitian yang saya teliti mengenai perspektif <i>collaborative governance</i> pengelolaan objek wisata bencana non alam.	Penelitian ini belum menjelaskan perubahan paradigma dari yang bersifat adaptif menjadi kolaboratif.
14.	Cintantya Andhita Dara, Rike Anggun Artisa (2020) “Pengembangan Desa Wisata Berbasis	Pemerintah kota Batu telah mengadopsi pendekatan tata kelola kolaboratif dalam mengembangkan desa	Penelitian ini membahas tentang pengembangan desa wisata menggunakan model <i>collaborative governance</i> .	Penelitian ini hanya menilai program-program pengembangan agrowisata yang akan dikembangkan tanpa menjelaskan program-

	<i>Collaborative Governance</i> di Kota Batu”	wisata. Hal ini terlihat dari model kerjasama dan pertukaran yang dilakukan oleh Pemkot Batu dan berbagai peserta baik swasta maupun masyarakat. Pemerintah Kota Batu menggunakan konsep pemerintahan kolaboratif untuk berupaya meningkatkan partisipasi berbagai peserta guna mengoptimalkan pengembangan desa wisata dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh pemerintah daerah. Salah satunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terlihat dari tumbuhnya opini masyarakat lokal (PAD) dalam industri pariwisata.	Sedangkan penelitian yang saya teliti tentang pengelolaan objek wisata menggunakan model <i>collaborative governance</i> .	program seperti apa saja kah yang perlu dikembangkan.
15.	Amandha Prameshwari, Dinda Okta Mevia, Edo Amsyah (2020) “ <i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> DALAM MANAJEMEN TATA RUANG DI CAFE SAWAH PUJON KIDUL KABUPATEN MALANG”	Penataan ruang Cafe Cawa Sawah Pujonkidul dapat membuktikan bahwa kolaboratif tata kelola tidak hanya sebatas kolaborasi antara peran pemerintah dan nonpemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi stakeholders, masyarakat, swasta, dan banyak aspek	Penelitian ini membahas mengenai <i>collaborative governance</i> dalam manajemen tata ruang café. Sedangkan penelitian yang saya teliti mengenai <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan objek wisata.	Penelitian ini hanya mengatakan komitmen dan konsistensi dari tiga komponen baik pemdes, pemda, dan masyarakat dalam pembangunan di pedesaan tanpa menjelaskan lebih lanjut.

		lainnya. segera. Pemerintah tidak dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Ketiga komponen pemerintah desa, pemerintah desa, pemerintah daerah dan masyarakat perlu berkomitmen dan konsisten dalam pembangunan perdesaan. Ketiga komponen ini harus bekerja sama dan saling mendukung.		
--	--	--	--	--

Dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian terdahulu itu kebanyakan membahas tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata bencana alam seperti erupsi gunung Merapi. Penelitian-penelitian terdahulu masih menggunakan teori dari Ansell dan Gash, De Seve, dan teori-teori *collaborative governance* dari pemikiran ahli lainnya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini membahas tentang kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata yang merupakan akibat dari bencana non alam yaitu terdampaknya dari pandemi Covid-19 dan peneliti menggunakan teori dari Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012).

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Pariwisata

Menurut definisi Norval tentang pariwisata dalam Muljadi dan Nurhayati (2002), adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan masuk,

tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam dan di luar negara, kota, atau wilayah tertentu. Menurut definisi luas yang dikemukakan oleh Kodhyat (1983), pariwisata adalah perjalanan sementara dari satu tempat ke tempat lain, dilakukan secara individu atau kelompok, dengan tujuan untuk mencari keseimbangan dengan lingkungan dalam bidang sosial, budaya, alam dan keilmuan. bahagia. aspek. Selain itu, menurut Musanef (Musanef, 1995) pariwisata mengacu pada periode perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain untuk menikmati perjalanan wisata dan rekreasi.

Menurut Yoeti (2008:8) pariwisata harus memenuhi empat kriteria di bawah ini, yaitu:

1. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan di luar tempat kediaman di mana orang itu biasanya tinggal.
2. Tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di negara, kota atau DTW yang dikunjungi.
3. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, dimana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan
4. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Sejauh menyangkut pariwisata, pasti ada empat faktor di dalam batasan yang menentukan pariwisata. Faktor-faktor tersebut adalah

perjalanan dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, dan perjalanan harus dikaitkan dengan orang yang datang ke sini hanya sebagai wisatawan. (Primadany, 2013).

Dalam pengembangan cagar budaya untuk pariwisata dibutuhkan aspek-aspek yang perlu dikembangkannya itu *attraction* (daya tarik wisata), *accessibilities* (mudah untuk diakses), *amenities* (fasilitas penunjang pariwisata), dan *ancillary service* (layanan pendukung pariwisata), dan *Institutions* (kelembagaan). Konsep pariwisata menyangkut destinasi SDM, pemasaran, dan kelembagaan (Asti Ayuningsih, 2018).

Akibat dari kegiatan kepariwisataan tersebut maka motivasi kegiatan kepariwisataan menyangkut obyek wisata yang ingin diketahui dan sarana serta prasarana pendukung yang diperlukan untuk menikmati obyek wisata tersebut. Menurut industri pariwisata disebut 3A yaitu atraksi, amenitas dan aksesibilitas. Atraksi bisa berupa sumber daya alam, seperti gunung, danau, pantai, air terjun, perbukitan, dll. Tempat wisata budaya, seperti arsitektur, rumah adat, situs arkeologi, kerajinan tangan, upacara atau ritual budaya, festival budaya, tarian tradisional, kegiatan atau kehidupan Komunitas yang unik, makanan, dll. dan atraksi buatan manusia, termasuk acara olahraga, belanja, pameran, konferensi, konser musik, dll. Amenitas adalah sarana yang mencakup berbagai prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh wisatawan ketika berada di suatu daerah tujuan wisata, antara lain sarana akomodasi, usaha makanan dan minuman, transportasi dan prasarana. Aksesibilitas merupakan pintu masuk utama ke tempat

tujuan wisata, termasuk bandara, pelabuhan, terminal, dan semua layanan transportasi lainnya. Selain itu, jalur ini juga dapat dialihkan, yaitu kemudahan berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Selain ketiga hal tersebut, terdapat fasilitas lain yang dapat mempermudah perjalanan yaitu keberadaan biro perjalanan (Suwena, 2010: 88-98).

1.6.2 Pariwisata Bencana

Definisi bencana menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan sumbernya, bencana menurut UU No 24 Tahun 2007 dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber yaitu:

1. Bencana Alam adalah bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti banjir, gempa bumi, dan letusan gunung berapi, tsunami dan lain-lain.
2. Bencana Non Alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh faktor non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.
3. Bencana Sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang

meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat dan terror.

Rosyidie (2004) lebih lanjut mengungkapkan bahwa bencana dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan pada siapa saja. Frekuensi dan seberapa kuat atau besar bencana tersebut pun susah untuk diprediksi. Melihat sifat dari bencana tersebut, maka sering kali terjadi banyak kerugian dan korban meninggal dunia maupun luka-luka.

Dalam buku Zaenuri (2018) yang berjudul Tata Kelola Pariwisata Bencana berbasis *collaborative governance* dikatakan bahwa konsep dasar pengelolaan pariwisata-bencana akan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Faulkner dengan gaya *entrepreneur*-nya melalui pendekatan manajemen resiko yang dikembangkan oleh Miller.

Langkah-langkah dalam pengelolaan bencana secara umum dapat dikelompokkan dalam beberapa fase antara lain *prodromal* (pra bencana), *emergency* (keadaan darurat), *intermediate* (menengah/menormalkan kembali), dan *long-term recovery* (pemulihan jangka panjang) (Faulkner 2007, Miller, 2005). Manajemen Bencana berlangsung melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada siklus kerja yaitu pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan siklus manajemen bencana menurut Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan

penanggulangan bencana terdiri atas tahap pra-bencana, saat bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Pada penelitian yang saya teliti ini berada pada siklus saat bencana karena sejak awal pandemi yakni bulan Maret hingga sekarang masih berlangsung. Siklus saat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana prasarana.

1.6.3 Collaborative Governance

Collaborative Governance adalah proses di mana berbagai pemangku kepentingan berpartisipasi dalam mewujudkan kepentingan masing-masing lembaga dalam mencapai tujuan bersama. (Cordery, 2004; Hartman et al., 2002).

Menurut definisi Ansell dan Gash (2007: 544), tata kelola kolaboratif adalah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik sehingga mereka dapat secara langsung melakukan proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan dinegosiasikan dengan pemangku kepentingan non-publik. Atau menerapkan kebijakan, mengungkapkan atau mengelola prosedur atau aset publik. Beberapa kata kunci dapat digunakan untuk mendefinisikan definisi ini. Kata kunci tersebut menekankan enam karakteristik, antara lain:

1. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam Lembaga publik.
2. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik.
3. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.
4. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama.
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.
6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Emerson dan Nabatchi (2015) memberikan definisi *Collaborative Governance* yaitu tata kelola kolaboratif merupakan suatu proses dan struktur perumusan kebijakan publik, pengambilan keputusan dan manajemen publik yang melibatkan masyarakat dan badan publik, tingkatan pemerintah, swasta, dan ranah publik untuk mencapai tujuan publik (kesejahteraan) yang belum terselesaikan.

Beberapa ilmuwan menggambarkan proses kolaborasi sebagai sebuah tahapan linier yang terjadi dari waktu ke waktu dimulai dari pendefinisian masalah menuju setting agenda hingga implementasi. Berlawanan dengan

Ansell dan Gash (2008) serta Thomson dan Perry (2006), Emerson (2013) melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang oriteratif. Emerson fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi. Komponen tersebut antara lain : Penggerakan prinsip bersama (*Principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*) dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

1. Pergerakan Prinsip Bersama (*Principled Engagement*)

Gerakan prinsip berbagi merupakan sesuatu yang terjadi dari waktu ke waktu dalam kolaborasi. Hal-hal seperti percakapan tatap muka atau melalui perantara teknis adalah cara untuk menerapkan prinsip berbagi. Dalam komponen ini, orang-orang menegaskan kembali tujuan bersama, pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip bersama, dan prinsip-prinsip ini biasanya diekspresikan dalam pandangan yang berbeda dari para pelaku yang terlibat. Oleh karena itu, penyatuan prinsip merupakan inti dari aspek ini (Emerson, Nabatchi dan Balogh, 2012).

2. Motivasi bersama (*Shared Motivation*)

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mengemukakan bahwa mutual incentives merupakan siklus penguatan diri yang terdiri dari empat elemen yang saling menguntungkan, antara lain: saling percaya, saling pengertian, legitimasi internal, dan komitmen.

3. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Yang dimaksud adalah berbagai hasil dari elemen-elemen lintas fungsional untuk menghasilkan tindakan yang efektif, karena adanya kapasitas memadai dari aktor.

Zaenuri (2018) menyatakan bahwa *collaborative governance* adalah sebuah tata kelola yang didalamnya mengatur lembaga-lembaga baik lembaga negara maupun non negara yang terlibat secara langsung dalam proses pengambilan suatu keputusan bersama yang berorientasi pada konsensus dan musyawarah. Skala tertinggi dari *collaborative governance* menurut (Zaenuri, 2018) adalah kemitraan. Tahapan *collaborative governance* dari membangun visi bersama, mendorong partisipasi pada semua stakeholder, membentuk jejaring yang luas antar pelaku pariwisata hingga menghasilkan kemitraan yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang.

Tujuan dari *collaborative governance* adalah untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tertentu dari pihak-pihak yang terlibat. Partai politik ini tidak terbatas pada pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, karena sesuai dengan prinsip *good governance*, masyarakat sipil berperan serta dalam pengambilan dan pengambilan keputusan.

Karena keterbatasan kemampuan, sumber daya dan jaringan semua pihak, mereka mulai bekerjasama, sehingga kerjasama dapat mempersatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong berhasilnya terwujudnya tujuan bersama. Dalam merumuskan tuhaen, visi dan misi, pedoman bersama dan nilai-nilai koperasi, semua pihak memiliki

kedudukan yang setara, yaitu berhak mengambil keputusan secara independen meskipun terikat kesepakatan bersama (Purwanti, 2016: 178).

Zaenuri, (2018) menyebutkan konsep pemerintahan kolaboratif ini sebenarnya telah meletakkan dasar yang kokoh, karena Cullen (2000) sebelumnya memberikan arahan tentang perlunya transformasi pemerintahan berdasarkan konsensus di antara tiga pilar pemerintahan untuk mengelola perubahan yang lebih cepat. Baru-baru ini, muncul ungkapan model pemerintahan yang merupakan pembaharuan dari konsep lama public relations (yang disebut new public governance) (Osborne, 2010). Konsep ini memberikan landasan yang lebih kokoh bagi adanya tata kelola kolaboratif, karena didasarkan pada konsep kelembagaan dan jaringan (teori jaringan) dan menitikberatkan pada organisasi dan lingkungannya (Osborne, 2010: 10).

Konsep kolaboratif *governance* sebagai basis pengelolaan pariwisata-bencana tentu saja dirumuskan dengan memadukan konsep *governance* dalam pariwisata dengan fenomena bencana dalam situasi tidak normal. Pengelolaan pariwisata berbasis kolaboratif *governance* harus memperhatikan aspek pendekatan manajemen resiko (Miller, 2005:11) dan dibutuhkan modus-operandi yang bersifat individualistik, fleksibel, inovatif, diskontinuitas, eksperimental, intuitif dan berani mengambil resiko (Faulkner, 2007). Model-model kolaborasi diantara ketiga pilar *governance* yang berwujud output-input (Hui, 2010) dijadikan sebagai pola

dasar untuk menjelaskan bagaimana bentuk variasi hubungan output-input tersebut pada perumusan visi bersama, partisipasi, jejaring dan kemitraan.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan (Singarimbun dan Sofian, 2008: 43). Berdasarkan pengertian tersebut maka definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Pariwisata merupakan perjalanan individu atau perjalanan kelompok dari tempat non hunian ke tempat tinggal sementara, dengan tujuan bersenang-senang dari hiburan, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan objek wisata yang dikunjungi sementara, namun tidak memperoleh penghasilan melainkan sebagai konsumen .
- b) Pariwisata bencana merupakan gangguan atau ancaman dari keadaan normal hingga menyebabkan kerugian dari gangguan tersebut yang bersumber dari alam, non alam dan sosial. Gangguan tersebut tidak dapat diprediksi kapan, dimana dan kepada siapa terjadinya.
- c) Collaborative Governance merupakan proses dari struktur jejaring multiorganosaso lintas sectoral (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang membuat kesepakatan bersama, pencapaian consensus melalui interaksi formal maupun informal, pembuatan dan pengembangan norma-norma dalam interaksi yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Sugiyono 2012: 31). Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti.

Tabel 1.2

Variabel	Indikator
Pariwisata	a. <i>Attraction</i> (daya tarik wisata) b. <i>Accessibilities</i> (mudah untuk diakses) c. <i>Amenities</i> (fasilitas penunjang pariwisata) d. <i>Ancillary service</i> (layanan pendukung pariwisata)
Pariwisata Bencana	a. Mitigasi bencana b. Saat bencana
<i>Collaborative Governance</i>	a. Pergerakan prinsip bersama (<i>Principled engagement</i>) b. Motivasi bersama (<i>Shared motivation</i>) c. Kapasitas melakukan tindakan bersama

1.9 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulisan proposal penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan sifat dari fenomena serta gejala yang membahas tentang perkembangan hubungan objek penelitian dengan aspek sosial di masyarakat (Surachmad, 1982). Metode ini memiliki karakteristik yang membutuhkan konsentrasi pada penyusunan masalah di penulisan dengan menyertakan pengumpulan data yang diatur, dijelaskan, dan dianalisis secara intensif dan terperinci (Nurmandi & Purnomo, 2011). Manfaat analisis kualitatif bertujuan agar dapat memahami, memaknai, dan mendefinisikan hubungan perbandingan antar gejala sosial yang saling berhubungan (Martono, 2011).

Menurut Denzin & Lincoln dalam buku (Al-Hamdi et al., 2020) penelitian kualitatif adalah sebuah bentuk usaha yang digunakan untuk melaksanakan rasionalisasi serta penafsiran yang dipahami oleh peneliti mengenai realitas kehidupan.

Dalam buku (Al-Hamdi et al., 2020) juga dijelaskan bahwasanya pada penelitian kualitatif sendiri didalamnya harus disertai dengan beberapa data lapangan atau bukti secara empiris yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang ada.

b. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian sebab wilayah ini memiliki potensi pariwisata baik alam, masyarakat, dan budaya. Adapun tempat yang dituju sebagai bahan penelitian penulis ialah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.15, Keniten, Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55571 dan Objek Wisata Situs Warungboto Jl. Veteran No. 77 Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55164.

c. Sumber Data

- Data Primer

Data primer yang didapatkan peneliti berasal dari kegiatan wawancara dan kunjungan langsung terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta serta instansi lain yang terkait. Pelaksanaan wawancara bertujuan agar peneliti mendapatkan data akurat dan kejelasan mengenai program padat karya yang diselenggarakan pihak tersebut.

- Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh sebuah instansi atau lembaga yang bertugas menjadi pengumpul data yang nantinya dipublikasikan kepada masyarakat yang menggunakannya. (Hanke dan Reitsch, 1998) dalam (Hamid & Susilo, 2015). (Kuncoro, 2009) dalam (Hamid & Susilo, 2015) juga menjelaskan pengertian secara singkat bahwa

data sekunder merupakan sebuah data yang sudah terkumpul dengan adanya pihak lain yang mengumpulkannya.

Pada penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu seperti jurnal sebagai bantuan acuan data dalam penulisan ini. Selain melalui penelitian terdahulu, peneliti juga menggunakan sumber berita online dan website resmi pemerintahan untuk mendapatkan data yang spesifik.

d. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara

Wawancara menjadi penting dalam sebuah penelitian kualitatif karena akan menggali informasi yang ditransformasikan dalam bentuk kata-kata. Dalam jurnal (Rahardjo, 2011) dijelaskan bahwa wawancara adalah sebuah cara untuk berinteraksi kepada orang lain yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan detail dengan menggunakan Tanya jawab didalamnya yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yataupun subjek pada penelitian. Pada dasarnya wawancara yaitu aktifitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi atau data yang lebih mendalam yang berhubungan dengan tema yang dijadikan dalam penelitian. Wawancara sendiri juga dapat dijelaskan sebagai sebuah cara untuk membuktikan tentang informasi yang didapat dari metode lainnya yang digunakan sebelumnya. Adapun pihak-pihak yang di wawancarai adalah :

Tabel 1.3

Data Informan

Informan	Jabatan
Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	Ketua Unit Tamansari dan Kotagede
Komunitas Pok Tumbu Waro	Ketua Komunitas Pok Tumbu Waro
Wisatawan	Pengunjung Destinasi Wisata Situs Warungboto

- Studi Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai catatan tertulis yang diterima peneliti dari narasumber terkait suatu hal yang telah terjadi baik fakta dan data sebagai bahan dokumentasi yang dapat dilampirkan dalam penelitian. Studi dengan melakukan penyelidikan data, dokumen penting, jurnal, berita, dan file terangkum dalam rangkaian dokumentasi ini.

e. Teknik Analisis Data

Menurut Hadi (1986) teknik analisa data yang di gunakan pada penelitian kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara, survey, dan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya guna mendapatkan data-data terdahulu agar mempermudah peneliti dalam membandingkan dan menganalisis data yang ada menjadi suatu pembahasan yang menarik. Akan tetapi pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu dalam

pencarian data sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang kemudian dikaji secara rinci ke dalam pembahasan guna mendapatkan kajian yang menarik. Adapun metode yang dapat digunakan dalam analisis data ialah metode induktif yang merupakan suatu pengambilan kesimpulan melalui data khusus yang dilanaskan fakta konkret untuk menarik generalisasi yang bersifat umum.

Menurut (Miles dan Huberman, 1992) komponen dalam analisis data meliputi *data collection*, *data reduction*, *data display*, *data conclusion drawing/verification*. Dalam analisis data sendiri merupakan suatu upaya untuk mengelola data menjadi informasi agar mudah untuk dipahami. Pengolahan data tersebut ada pada reduksi data yang mana merupakan suatu proses untuk memilih data serta merangkum data tersebut guna mencari tema dari data yang ada serta akan digunakan untuk mempermudah mengumpulkan dalam mencari data yang apabila dipandang belum memiliki bentuk serta asing ataupun tidak dikenal, hal itu dijadikan suatu perhatian karena dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mencari maksud dari hal yang belum diketahui itu.

Mengenai penelitian yang didapatkan melalui beberapa sumber, maka penulis akan menganalisis tema tersebut dengan logika yang relevan serta di imbangi fakta yang akurat agar mempermudah dalam melakukan analisa dan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga melahirkan penelitian yang tidak sama seperti penelitian sebelumnya. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam menulis penelitiannya

agar mendapatkan data secara akurat guna mempermudah pengkajian permasalahan ialah :

- Reduksi data

Reduksi data merupakan penyaringan data-data kasar yang ditemukan oleh peneliti baik di lapangan ataupun melalui penelitian sbelumnya agar memudahkan penulis dalam melakukan ringkasan dan pelaksanaan analisis sehingga penulis mendapatkan data akurat yang pantas untuk di tampilkan dalam penelitian ini. Bentuk analisis ini mampu menajamkan , menggolongkan, memilah sedemikian rupa untuk mendapatkan penarikan hasil yang dapat diverifikasi. Data kualirtatif yang dihasilkan dari reduksi ini akan lebih mudah untuk disederhanakan dan transformasikan melalui berbagai macam cara, yaitu : seleksi, penggolongan, ringkasan agar mendapatkan hasil yang singkat dengan satu pola yang luas.

- Penyajian data

Setelah peneliti mengumpulkan data dan menyeleksi data yang di dapatkan, maka penulis melakukan penyajian data sesuai dengan kebutuhan penelitian agar tidak menampilkan kelebihan data yang mampu menimbulkan kerumitan analisa atau bahkan kekurangan data yang menyebabkan kurang relevan dan akuratnya penelitian tersebut sebab minimnya fakta di lapangan.

- Matriks kesimpulan

Matrik kesimpulan merupakan penarikan benang merah yang penulis dapatkan dari perolehan data. Pada tahap ini penulis dapat membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang dapat menunjang permasalahan dalam penelitian ini mengingat terdapat beberapa rumusan masalah yang harus di selesaikan melalui pencarian jalan keluar dari hal-hal yang dijadikan perhatian dalam penelitian ini.

Dan dalam penelitian ini tujuan dari analisis data kualitatif ini yaitu untuk mengetahui dan guna menjawab rumusan masalah tentang perspektif *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata selama masa pandemi Covid-19 studi kasus Situs Warungboto tahun 2020.